

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang, seperti Indonesia. Permasalahan kemiskinan masih menjadi pokok persoalan yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Pada kondisi saat ini, tingkat kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga telah bergeser. Menurut *World Bank* (dalam Whisnu Adhi Saputra, 2011), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Disamping itu, kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian di hampir setiap negara, terlebih lagi di negara berkembang seperti Indonesia yang masih memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di sekitarnya. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara benar, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Permasalahan strategis yang ada di Provinsi Gorontalo tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada di tingkat nasional, yaitu persoalan kemiskinan yang masih relatif tinggi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebagai penyangga dalam proses perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin. Pemerintah memiliki tanggung jawab mencari jalan keluar dan merumuskan langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan.

Gambar 1.1
Persentase (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)
di Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2015

Tahun	Persentase Penduduk Miskin/P0 (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)
2008	20,47	182,90
2009	18,34	165,11
2010	16,55	172,60
2011	18,02	192,36
2012	17,22	186,76
2013	18,00	198,47
2014	17,41	195,10
2015	18,32	206,84

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Gorontalo,2016

Secara garis besar, persentase dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo dari tahun 2008 hingga tahun 2015 mengalami naik turun seperti yang terlihat pada tabel 1.1. Persentase dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada tahun 2008 sebesar 20,47 persen dan 182,90 ribu jiwa. Persentase dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 18,34

persen dan 165,11 ribu jiwa. Persentase dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 sebesar 16,55 persen dan 172,60 ribu jiwa. Dibandingkan tahun 2011 sebesar 18,02 persen dan 192,36 ribu jiwa, berarti terjadi peningkatan. Pada tahun 2012, persentase dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 17,22 persen dan 186,76 ribu jiwa. Tahun 2013 persentase dan jumlah penduduk miskin sebesar 18,00 persen dan 198,47 ribu jiwa turun hingga menjadi 17,41 persen dan 195,10 ribu jiwa pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan persentase dan jumlah penduduk miskin sebesar 18,32 persen dan 206,84 ribu jiwa.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru, dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Harianto dan Adi, 2007) (dalam Fajar Nugroho,2012). Otonomi daerah serta desentralisasi tidak bisa terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan wujud upaya peningkatan kapasitas pemerintah

daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan daerah tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana. Pembangunan fisik tersebut dapat dilaksanakan jika perencanaannya dimasukkan dalam APBD pada pos belanja, khususnya belanja modal. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan, peran proses penganggaran sangatlah signifikan.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah kemiskinan yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Untuk mengukur mutu modal manusia, *United Nations Development Program (UNDP)* mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lanjouw dkk (dalam Yani Mulyaningsih, 2008 dikutip dari Whisnu Adhi Saputra, 2011) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia

adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Peran pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mempengaruhi kemiskinan termasuk dalam mengantisipasi kegagalan pasar dalam perekonomian sangat penting. Perannya melalui kebijakan fiskal ditargetkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan, distribusi pendapatan dan pengangguran).

Seperti yang didefinisikan dalam standar internasional, pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan yang diinginkan pada tingkat upah tertentu. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada di suatu daerah menjadi semakin serius. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara (Tambunan, 2001) (dalam Whisnu Adhi Saputra, 2011). Pengangguran biasanya disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: (1) pengangguran friksional, yaitu pengangguran

yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan meninggalkan pekerjaan awalnya, (2) pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktural dalam perekonomian, dan (3) pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku akibat pengurangan dalam permintaan agregat Sukirno (2005).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai jumlah penduduk miskin di Gorontalo. Selain itu di dalam penelitian ini juga akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih tinggi.
2. Rendahnya fasilitas layanan publik untuk investasi.
3. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo yang tinggi.
4. Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo?
3. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
3. Menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi ke dalam dua aspek, yaitu :

1.5.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuan tentang ekonomi pembangunan, khususnya faktor-faktor dalam kaitan dengan Kemiskinan.

1.5.2 Secara Praktis

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah Provinsi Gorontalo dan pihak yang terkait dalam menentukan arah,

kebijakan dan strategi daerah yang akan digunakan untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dapat dijadikan sebagai sektor penggerak.

2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.
3. Sebagai referensi bagi penulis lain yang mempunyai keterkaitan untuk mengembangkan penelitiannya.